

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur merupakan proyek berskala besar yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati yang sangat kaya di wilayah tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti *Stockholm Declaration* 1972 dan *Convention on Biological Diversity* 1992, tujuan dan fokus utama dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah berfokus pada perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di tingkat nasional, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, yang secara tegas mengatur kewajiban untuk melindungi ekosistem, mencegah perusakan hutan, serta menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Secara normatif, pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati sudah sangat konkret dan substantif diatur dan oleh Indonesia.
2. Implementasi dari seluruh pengaturan yang mengatur tentang Konservasi Terhadap Keanekaragaman Hayati di Indonesia masih jauh dari kata maksimal, terkhusus dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia. Hal ini sebagaimana yang penulis sampaikan di dalam rumusan

masalah kedua, terkait dengan dampak-dampak terhadap keanekaragaman hayati akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara yang masih menjadi catatan utama di dalam proses pembangunan tersebut. Selain itu, terkait dengan upaya-upaya, tantangan dan rekomendasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan pihak Pemerintah dan Non Pemerintah, masih terdapat beberapa catatan penting yang menjadi bagian dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan fakta-fakta yang didapat oleh penulis, masih banyak catatan-catatan penting terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, dan dengan hal itu Indonesia belum maksimal dalam upaya mengimplementasikan seluruh pengaturan terkait dengan konservasi terhadap keanekaragaman hayati.

B. Saran.

1. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, hal inisebagaimana yang telah diamanatkan dalam instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek pembangunan harus disertai dengan kajian lingkungan hidup strategis yang menyeluruh, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta pengawasan ketat terhadap potensi pelanggaran lingkungan. Selain itu, integrasi koordinasi antar lembaga serta partisipasi publik, khususnya komunitas lokal dan ilmuwan lingkungan, perlu ditingkatkan agar kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

2. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat pelaksanaan serta pengawasan terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati. Penguatan ini mencakup kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dan realisasinya di lapangan, agar pembangunan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup. Pertama, prinsip-prinsip konservasi harus secara tegas diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, terutama melalui dokumen AMDAL dan perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan. Kedua, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat lokal dan adat sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan menjamin partisipasi publik dalam pelestarian lingkungan. Ketiga, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan edukasi publik mengenai pentingnya konservasi harus dilakukan secara berkelanjutan guna membangun kesadaran kolektif. Terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap dampak pembangunan IKN terhadap keanekaragaman hayati. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan serta langkah-langkah mitigasi yang konkret demi menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.